

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dan dalam suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau suatu wilayah secara berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Beberapa ahli berpendapat mengenai pertumbuhan ekonomi, diantaranya menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang mantap dimana kapasitas produktif dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih besar.

Sedangkan menurut Kunarjo (2003), pertumbuhan ekonomi adalah situasi yang menggambarkan produk domestik bruto per kapita suatu negara yang mengalami peningkatan. Adapun menurut Nanga (2001), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.

Menurut Sukirno (2006), teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain:

A .Teori Pertumbuhan Klasik teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini lebih menaruh perhatian pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini juga mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori ini juga menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk dan disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah, maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Sementara itu, jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal, maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertambahan jumlah penduduk suatu wilayah akan berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

B. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Kedua ahli ini menggunakan proses perhitungan yang berbeda, tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini secara keseluruhan melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

- Perkonomian bersifat tertutup,
- Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan;
- Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*);
- Tingkat pertumbuhan angkatan kerja konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap serta perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan, bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mantap (seluruh

kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan berikut:

$$g = K = n$$

Dimana : $G = Growth$ (Tingkat Pertumbuhan *Output*)

$K = Capital$ (Tingkat Pertumbuhan Modal)

$n =$ Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan, bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

C . Teori Pertumbuhan Neo-klasik teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya *output* yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Oleh karena itu, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-*output* dan rasio modal-tenaga kerja. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat

pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, penambahan penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas *capital* meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu. Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna, karena dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Hal lain yang harus diusahakan, menurut teori neo-klasik, adalah terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan, bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat *saving* yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali. Dengan adanya tingkat *saving* yang tinggi dan reinvestasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi ke depan lebih stabil.

D . Teori Schumpeter teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, karena kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, akan tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Selain itu, didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini

akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Peningkatan kegiatan ekonomi tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi, sehingga produksi agregat akan bertambah. Selanjutnya, jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi, maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang. Hal ini disebabkan masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya, sehingga jalannya pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat dan pada akhirnya mencapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

Terkait dengan uraian tersebut, Sukirno (2005) mengemukakan faktor-faktor yang akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi:

- 1 Peranan Sistem Pasar Bebas, sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Oleh sebab itu, pemerintah tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Fungsi pemerintah perlu dibatasi pada penyediaan fasilitas-fasilitas yang menggalakkan perkembangan kegiatan pihak swasta, infrastruktur, pengembangan pendidikan dan kinerja pemerintah yang efisien sebagai langkah-langkah yang akan membantu pihak swasta.

- 2 Perluasan Pasar, perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan produksi dengan tujuan untuk menjual produknya kepada masyarakat dan mencari untung. Semakin luas

pasaran barang dan jasa, semakin tinggi tingkat produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Pasar luar negeri penting juga diperhatikan dalam rangka mengembangkan kegiatan di dalam negeri.

3 Spesialisasi dan Kemajuan Teknologi, perluasan pasar dan perluasan kegiatan ekonomi yang digalakkan akan memungkinkan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan peningkatan produktivitas. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran. Keadaan ini akan mengembangkan spesialisasi, sehingga siklus ini mengakibatkan perekonomian terus berkembang.

Kemudian untuk mengetahui besar kecilnya pertumbuhan ekonomi di suatu Negara atau daerah dilihat dari produktivitas atau output yang di hasilkan dari Negara atau daerah tersebut dalam hal ini adalah Produk Domestik Bruto untuk suatu Negara dan PDRB untuk suatu daerah dimana PDB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam periode waktu tertentu (satu tahun).

2.1.2 Teori Investasi

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003). Investasi meliputi penambahan stok modal atau

barang di suatu Negara, seperti bangunan, peralatan produksi ,dan barang - barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang (Samuelson 2004). Menurut Sukirno (2005) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- (1). investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja,
- (2). penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- (3). investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli maka dapat di simpulkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan suatu proses pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa barang modal, bangunan, peralatan modal dan barang barang inventaris yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan output yang di hasilkan dari proses produksi baik itu pemerintah maupun swasta .

Berdasarkan Jenisnya investasi di bagi menjadi dua jenis yaitu ; pertama investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan *Government Expenditure* . kedua investasi yang di lakukan pihak swasta . dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari 2 macam yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri yang

dilakukan oleh swasta nasional dan Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh investor luar negeri . pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan sedangkan investasi yang di lakukan pihak swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan.

2.1.3 Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanam modal dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan, perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi, pembaharuan, perluasan , pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa. Penanaman modal (investment), penanaman uang atau modal dalam suatu usaha

dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Pasal 1 angka 2 UUPM menyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri . Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM) . Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . misal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Misal : perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdagangan umum .PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi, perkebunan. Dalam pelaksanaannya Penanaman Modal Dalam Negeri di atur dengan undang undang Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung .kemudian Pelaku Investasi yaitu Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia. Berdasarkan Keppres No. 29/2004 tentang penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap mencakup beberapa hal seperti yang tertera berikut ini :

- Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi tbs melalui pelayanan satu atap
- Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;
- Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal

Selain itu untuk meningkatkan minat penanaman modal dalam negeri setidaknya ada beberapa hal yang harus di perhatikan di antaranya yaitu Ketersediaan data pendukung untuk analisis usaha (terutama data awal): Tingkat hasil (return) yang mungkin diperoleh; Stabilitas politik keamanan di daerah itu sendiri ;Pasar yang dilayani;Kebijakan pemerintah daerah Daya serap terhadap angkatan kerja; Tingkat responsibilitas masyarakat terhadap jenis usaha yang akan di kembangkan : Birokrasi bisnis di daerah ; Tingkat persaingan. Bila pemerintah daerah mampu memberikan jaminan terhadap semua unsur variabel maka para investor akan mempertimbangkan dan pada gilirannya dapat memutuskan menanamkan modalnya di daerah. Selain itu setidaknya terdapat dua faktor utama yang cukup Berpengaruh Terhadap tinggi rendahnya tingkat investasi atau penanaman modal di antaranya yaitu tingkat suku bunga dan tingkat pengembalian(return)

2.1.4 Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua Negara yang menganut system ekonomi terbuka , pada umumnya memerlukan investasi asing terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa.

Lebih lanjut Salvatore (2007) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas :

- Investasi portofolio (*portofolio investment*) yakni investasi yang melibatkan asset asset finansial saja seperti obligasi dan saham yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan kegiatan Investasi portofolio ini biasanya

berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan atau perusahaan dan sebagainya.

- Investasi Asing Langsung (*Foreign direct Investment*) yaitu penanaman modal yang meliputi investasi ke dalam *asset-asset* secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, hotel, pengadaan berbagai macam barang modal pembelian tanah dan lain sebagainya.

Definisi penanaman modal asing (PMA) antara lain sebagai alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia, Sedangkan menurut Krugman (2004) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control terhadap perusahaan di luar negeri. Dapat di simpulkan bahwa *Foreign Direct Investment* atau yang kita kenal dengan sebutan FDI adalah sebuah proses atau cara dalam melakukan investasi ke luar negeri. Yang dimaksud dengan FDI adalah dimana perusahaan multinasional membangun anak perusahaan mereka di negara lain, yang menjadi tujuan ekspor untuk mempermudah kegiatan ekspor-impor dan juga menghemat biaya. Ada beberapa kondisi mengapa sebuah perusahaan multinasional melakukan FDI ke negara tujuan ekspor adalah untuk menghemat biaya transportasi, Adanya hambatan dari pemerintah negara tujuan ekspor, Harapan untuk mempekerjaan penduduk lokal. FDI (*Foreign Direct Investment*) adalah salah satu bukti bahwa perekonomian sudah makin mengglobal. Hal ini dimulai

pada saat sebuah perusahaan multinasional dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (Home Country) dapat mengontrol perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (Host Country) baik sebagian atau seluruhnya. Biasanya, FDI terkait dengan investasi asset-aset produktif, seperti pembelian tanah, peralatan, dan bangunan atau pembangunan pabrik yang baru yang dilakukan oleh perusahaan yang akan berinvestasi. Pada dasarnya Penanaman Modal Asing bagi Indonesia berfungsi sebagai sumber dana modal yang dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Juga berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi. Serta Membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan. .Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran. Serta mampu mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Juga menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan yang paling penting adalah penambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal. Adapun tujuan dari para investor asing menanamkan modalnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Serta menjadi rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain. Terdapat beberapa factor yang dapat menghambat masuknya Penanaman Modal asing di antaranya yaitu Instabilitas Politik dan Keamanan.. Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan. .Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah. Kurangnya jaminan kepastian hukum.serta lemahnya

penegakkan hukum. Kurangnya jaminan/ perlindungan Investasi. Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakan ,Masih maraknya praktek KKN .serta citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia. Serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten .Untuk itu diperlukan transparansi pasar keuangan dalam informasi yang terpercaya yang mengalir dalam suatu aliran yang stabil agar investor berminat meng investasikan dananya . Tidak adanya transparansi selama proses investasi dapat sangat membatasi rentang perhatian para investor asing. Pasar finansial yang terbuka harus dibebaskan dari kendali pemerintah langsung dan perdagangan bawah tangan (insider trading). Adanya aturan hukum para ahli ekonomi yang telah disepakati. Nilai tukar yang fleksibel. Sehingga memudahkan para investor untuk berinvestasi

2.1.5 Belanja Modal

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2007) bahwa peranan atau

campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja, pengangguran dan tingkat harga. Menurut Guritno (2009), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Kemudian pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat

tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP (Gross Domestic Product) semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran - pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesoebroto, 2003). Sedangkan Menurut Peacock dan Wiseman mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB .Menurut permendagri tahun 2006, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Pemerintah Dalam Menjalankan

Pemerintahannya tidak lepas dari pembiayaan dan belanja yang berasal dari beberapa sumber diantaranya pinjaman luar negeri , pendapatan bukan pajak,pajak daerah, laba keuntungan dari BUMN namun pajak lah sumber dana terbesar yang di gunakan pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya . Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah di lakukan mengenai pertumbuhan Ekonomi diantaranya :

NO	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Zulfahmi (2010)	Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Investasi swasta X2 : investasi pemerintah X3 : ekspor migas X4 : ekspor non migas	Hasil penelitian menunjukan investasi swasta, investasi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan sebesar 0,199833 dan ekspor migas, ekspor non migas secara bersama - sama berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sebesar 0,01579
2	Deddy Rustiono (2008)	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja,dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Tenaga Kerja X2 : PMA	Hasil estimasi diketahui bahwa tenaga kerja berpengaruh positif tidak signifikan sebesar 0.05324 kemudian secara bersama sama

		Provinsi Jawa Tengah	X3 : PMDN X4 : Belanja Pemerintah	investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 1,002 terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah
No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Eddy Wibowo Candra (2012),	Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Pengeluaran pemerintah X2 : Tenaga kerja X3 : Pmdn	Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja secara bersama sama bernilai positif dan Signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2767 kemudian secara parsial variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif tidak signifikan sebesar 0,01987.
4	Arif Yunarko (2007),	Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah	Y : PDRB Jawa Tengah X1 : Investasi X2 : PAD X3 : Tenaga Kerja	Hasil penelitian membuktikan variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah sebesar 0,185 , sedangkan tingkat investasi dan tenaga kerja secara bersama - sama berpengaruh positif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto Jawa Tengah sebesar 0,076787.
5	Sayekti Suindyah D (2009),	Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Investasi X2 : Tenaga Kerja X3 : Pengeluaran Pemerintah	Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa secara parsial variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jawa timur sebesar 0,15221. kemudian secara bersama-sama variabel tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah

				berpengaruh positif dan tidak Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi jawa timur sebesar 0,01783247
NO	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
6	Merry anita Sari (2013)	Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Pengeluaran Pemerintah	Hasil yang di dapat dari analisis menggunakan spss 16 menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mencapai 1,7% pertahun
7	Tria dessy (2014)	Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap perkembangan ekonomi provinsi lampung periode tahun 2000-2013	Y :GDP provinsi Lampung X1 : PAD provinsi lampung X2 : Investasi swasta X3 : Pengeluaran pemerintah	Hasil yang di dapat dari analisis ini yaitu secara parsial variabel investasi pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perkembangan ekonomi provinsi lampung sebesar 0,0188762 kemudian Secara parsial variabel Investasi swasta(Pma pmdn) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi provinsi lampung sebesar 0,1832327 PAD (Per tenaga kerja) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Perkembangan ekonomi di provinsi lampung.
8	Bambang Muqsythu (2014)	Analisis pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Investasi Lokal X2 : Investasi asing langsung X3 : Pengeluaran Pemerintah	Hasil menunjukkan bahwa investasi lokal berpengaruh positif dan tidak signifikan sebesar 0,019724, Investasi asing langsung positif dan signifikan sebesar 0.1429, Pengeluaran Pemerintah positif dan tidak signifikan sebesar 0.0140872 dan tenaga kerja positif dan

			X4 : Tenaga Kerja	tidak signifikan sebesar 0.055265 terhadap pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta.
No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
9	Ganjar sarwiono (2017)	Analisis tingkat kinerja penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2014	Y : Pertumbuhan ekonomi indonesia X1 : Tenaga Kerja X2 : Pengeluaran Pemerintah X3 : PMDN X4 : PMA	Hasil penelitian menunjukkan variabel Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah, secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.58 dan 0.23. Sedangkan variabel penelitian PMDN dan PMA, secara bersama-sama berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0.0012 dan 0.012
10	Muhammad Rafiq (2011)	Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga, investasi dan pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 2001-2010	Y : Pertumbuhan ekonomi indonesia X1 : Pengeluaran konsumsi rumah tangga X2 : Investasi X3 : Pengeluaran Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial konsumsi rumah tangga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,00561 kemudian secara bersama - sama investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 2001:T1-2010:T4. Sebesar 0,7865

11	Hewi susanti (2011)	Analisi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provisini Aceh setelah Tsunami	Y : PAD provinsi Aceh X1 :Pertumbuhan Ekonomi X2 : Pengeluaran pemerintah provinsi Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama sama variabel Pertumbuhan ekonomi provinsi aceh dan Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah provinsi aceh sebesar 0,4221 dengan level $\alpha =$ 0.10 dan $\alpha = 0.01$.
NO	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
12	M Ribai Subhanda Lubis (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota Padang Sidimpuan(2004-2009)	Y : pertumbuhan ekonomi X1 : Pendapatan asli daerah X2 : Pengeluaran pembangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PAD dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota padang sebesar 0,5211
13	Zul Iqram (2015)	Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia	Y : pertumbuhan ekonomi indonesia X1 : <i>Foreign Direct Investment</i> X2 : Nilai tukar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa,FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, nilai tukar berpengaruh terhadap <i>FDI</i> dan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap FDI dan nilai tukar. Uji Kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan dua arah diantara setiap variabel. Disimpulkan bahwa variabel investasi asing langsung, nilai tukar dan PDB saling mempengaruhi

14	Zulfan Safran (2015)	Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Ekspor, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Foreign Direct Investment di kota aceh 2000-2014	Y : Investasi Asing Langsung X1 : Nilai tukar X2 : Ekspor X3 : Produk domestik bruto	Hasil analisis menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial nilai tukar, ekspor dan produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI sebesar 0,5231 pada tingkat keyakinan 95 persen. Kemudian Secara Bersama-sama nilai tukar, ekspor dan produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap investastasi langsung di kota aceh sebesar 0,423202
No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil penelitian
15	Maya malissa (2016) Analisis Investasi Langsung Di Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik bruto, suku bunga dan nilai tukar terhadap investasi langsung di Indonesia	Y : investasi langsung (<i>Foreign direct Investment</i>) X1 : Produk domestik bruto X2 : Suku bunga X3 : Nilai tukar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama produk domestik bruto dan suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap investasi langsung di Indonesia sebesar 0,75023 sedangkan nilai tukar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap investasi langsung di Indonesia sebesar 0,012202
16	Dinda ainun (2017)	Pengaruh Aliran Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2004-2014	Y :Pertumbuhan Ekonomi X1 : Investasi Langsung Asing X2 : Pinjaman Luar Negeri.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pinjaman luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,18702.dengan tingkat keyakinan 80% Di sisi lain,secara parsial variabel investasi langsung asing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,052431

17	Ipa Jamiah Arfah (2016)	pengaruh perdagangan dan penanaman modal asing terhadap perekonomian indonesia 1970-2013	Y : pertumbuhan ekonomi X1 : modal X2 : Tenaga kerja X3 : Penanaman modal asing X4 : perdagangan	Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka pendek modal, penanaman modal asing dan perdangan memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang modal, tenaga kerja, penanaman modal asing dan perdagangan memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil penelitian
18	Nazlia wibowo (2013)	Analisis Determinan Investasi Asing di Indonesia 2000-2012	Y : investasi asing X1 : produk domestik bruto X2 : Tingkat bunga rill	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi Asing di Indonesia, sedangkan tingkat suku bunga riil Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing di Indonesia.
19	Hafiz Defarahmi (2017)	Dampak Defisit Anggaran dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1990-2014	Y : pertumbuhan ekonomi X1 : defisit anggaran X2 : penanaman modal asing di Indonesia	Hasil Penelitian ini berlawanan dengan teori secara umum, Oleh karena itu perlu penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan tambahan variabel atau rentang waktu penelitian

20	Rio malaon nasution (2015)	Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Tingkat Bunga Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia	Y : investasi asing langsung X1 : Produk Domestik Bruto X2 : Tingkat bunga	Berdasarkan hasil estimasi dapat disimpulkan bahwa variabel PDB berhubungan positif dan signifikan terhadap investasi asing, sementara variabel tingkat bunga berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia.
----	-------------------------------	--	---	---

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan antara Penanaman modal dalam negeri dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Dornbusch dan Fischer berpendapat bahwa penanaman modal adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Pembentukan investasi disini ialah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau

pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Prasetyo, 2009).

2.3.2 Hubungan Penanaman modal Asing Dan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Karenanya pemerintah setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju terus berupaya meningkatkan investasi di negaranya, baik investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun investasi luar negeri. Investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan di suatu negara yang sedang berkembang. Hal ini menjelaskan bahwa investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Hasibuan, 1990:112).

Terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: pertama, Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanam, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Dan ketiga, Kemajuan teknologi (Todaro, 2000). Dari ketiga faktor tersebut disimpulkan bahwa sumber kemajuan ekonomi bisa meliputi berbagai macam faktor. Secara umum dapat dikatakan bahwa sumber utama pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal dan sumber daya manusia dan fisik yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas sumber daya produktif dan yang bisa

menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi, dan kemajuan teknologi (Salomo : 2007). Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Watak yang pertama dapat disebut sebagai dampak permintaan dan yang kedua sebagai dampak penawaran investasi, oleh karena itu selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa meningkat (Jhingan, 1994: 291). Menurut Tarigan (2005), Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi Perekonomian bersifat tertutup, Hasrat menabung ($MPS=S$) adalah konstan, Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale), serta Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Merujuk pada teori Harrod-Domar agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap atau steady growth, maka diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya: Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal masyarakat digunakan secara penuh. Selain itu, Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti bahwa pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. Lebih lanjut dalam teori harrod-domar, Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Ini berarti bahwa fungsi tabungan dimulai dari titik nol, dan Kecendrungan untuk menabung rasio antara modal-output ($\text{capital-output ratio} =$

COR) dan rasio pertambahan modal-output (incremental capital output = ICOR) besarnya tetap (Widodo, 2006: 156)

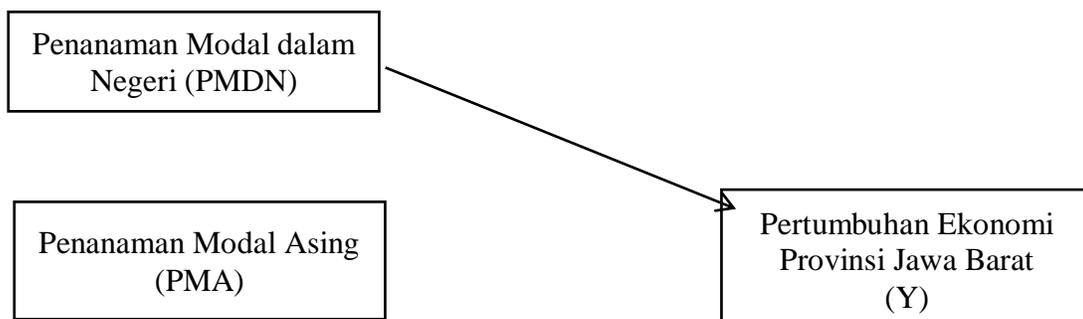
Hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah dengan adanya investasi berupa pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sehingga hal ini dapat meningkatkan PDB riil Indonesia dan dengan demikian akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Tri Handayani, 2011). Peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, yang pada tahap selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Adrian Sutawijaya, 2010: 26)

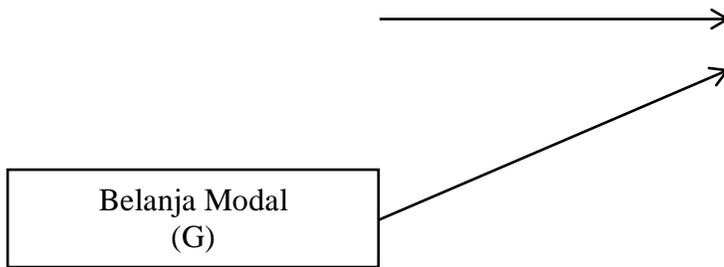
2.3.3 Hubungan antara Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi diterangkan dalam Keynesian Cross dimana peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak positif pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output (Mankiw, 2003). Dalam teori Peacock dan Wiseman menyatakan perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif

pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal meningkatnya pendapatan nasional menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesobroto, 1993).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal. Investasi dapat dilakukan oleh swasta berupa investasi PMDN dan PMA lalu pengeluaran pemerintah berupa belanja modal, belanja barang dan jasa atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dengan demikian tingkat investasi baik PMDN dan PMA, dan belanja modal pemerintah diharapkan menjadi pendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Nilai investasi PMDN, PMA, Belanja modal pemerintah di Provinsi Jawa Barat dijadikan variabel-variabel independen yang secara parsial ataupun bersama-sama diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Berdasarkan pernyataan diatas dapat dibuat skema hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya sebagai berikut:





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar dan salah. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut :

1. a. Di duga secara parsial penanaman modal dalam negeri, dan belanja modal pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2007 – 2017
- b. Di duga secara parsial Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2007-2017

- 2 Diduga secara bersama Penanaman Modal dalam Negeri , Penanaman Modal Asing dan belanja modal pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2007-2017